

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khaliffah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2021.
- Arikunto, Suhartini. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Pranada Media Group, 2006.
- Farida, Indriati Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada. *Fiqh siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Kartono. *Pengantar Metodologi Social*. Bandung: PT Gramedia, 2001.
- Kosasih, Ade dan Imam Mahdi. *Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral*, Bengkulu: Penerbit Vanda, 2016.
- Latif, Abdul. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Librayanto, Romi. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makasar: PUKAP, 2008.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.

- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo, 2007.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Sosial Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Setiawan, Dian Bakti. *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Press, 1993.
- Soehino. *Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Liberty, 1977.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIN Press, 1980.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suratman & Philips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suwanda, Dadang. *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama 2009.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Wasistiono, Sadu dan Ondo Riyani. *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jatinangor: Alqaprint, 2002.

ARTIKEL JURNAL

- Budiyono. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Januari-April, 2013): 1-12.
- Halawa, Yanuarius. dkk. “Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah”, *Nommensem Journal of Constitutional and Administratif Law*, Vol. 01, No. 01 (Mei, 2022): 35-44.

Mambu, Berny R. “Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XX, Nomor 3, (2012).

Ma’rif, Toha. “Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash—Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syadzali”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No 2 (Agustus, 2015): 27-56. Marwan, “Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurisprudentue*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2019): 265-275.

Sugianto, Bambang. “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014”, *Sekolah Tinggi Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 15, No. 3, (September, 2017): 343-358.

Zulfa, Desy Zuroida. “Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqih Siyasah”, *Al-Balad: Jurnal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1 (2019): 1-7.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah